

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surabaya secara geografis berada di 07°09'00" – 07°21'00" LS dan 112°36'- 112°54' BT. Mempunyai luas dataran 326,81 km² dan lautan 190,39 km² ialah ibukota Jawa Timur yang menjadi kota pusat pemerintahan maupun perekonomian. Selain itu Surabaya menjadi pusat pendidikan sehingga banyak mahasiswa dari berbagai daerah yang datang dan menetap disana. Selain itu, Surabaya berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat bisnis, industri, pusat santai, pusat rekreasi, dan sejumlah kegiatan lainnya. Dalam situasi seperti ini, baik tingkat perjalanan yang terjadi di kota Surabaya sangatlah tinggi. Dalam proses pendistribusian dan komoditas, Surabaya terhubung dengan kota lain salah satunya, yang paling terkenal adalah Kota Malang, Jawa Timur yang dijuluki sebagai kota pendidikan dan parawisata. dengan kondisinya saat ini menjadikannya salah satu tujuan wisata yang sering didatangi.

Aktivitas ekonomi saat ini pada era globalisasi telah sangat berkembang dan terjadi hampir di segala sektor usaha. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pertumbuhan sektor penjualan jasa sangat terasa. Salah satunya adalah perusahaan jasa transportasi yang bekerja baik antar kota ataupun dalam kota. Perusahaan jasa transportasi merupakan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses pemindahan, pergerakan, pengangkutan, agar sesuai dengan waktu yang diinginkan. (Nasution, 2008).

Penetapan tarif bertujuan untuk menciptakan pengguna sarana prasarana transportasi dengan pertimbangan rute yang dilewati. Keputusan untuk menetapkan tarif sewa kendaraan harus tepat. Tarif yang tinggi dapat memberikan keuntungan yang cepat tetapi memberikan efek sedikit penumpang karena tingginya tarif yang dikeluarkan. Bagi pemilik usaha otobus, tarif merupakan sebagian dari harga jual produk. Namun bagi pengguna, tarif adalah biaya yang dikeluarkan guna memperoleh tingkat pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, penetapan tarif yang baik seharusnya menggunakan strategi

tertentu agar mencapai tujuan yang dimaksud, hal ini karena tarif selalu berubah atau tidak tetap seiring berjalannya waktu. Salah satu dasar penentuan tarif yang efektif adalah berdasarkan BOK dengan memperhatikan pendapat penumpang dari sisi kemampuan membayar dan kemauan membayar.

Pemerintah daerah menentukan besaran tarif dengan ketetapan tarif maksimum (batas atas) dan tarif minimum (batas bawah) sesuai dengan besar biaya operasional kendaraan, dengan harapan besaran tarif yang akan ditetapkan tidak membebani penumpang dan sebanding dengan ketetapan yang berlaku serta menghasilkan keuntungan yang sesuai kepada pihak perusahaan otobus. Pemerintah sepatutnya mempertimbangkan kepentingan dari 2 pihak yaitu dari operator agar memperoleh keuntungan dan masyarakat agar tidak terbebani dengan tarifnya. Dengan telah disahkannya Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2023 Tentang tarif Dasar, Tarif Jarak Batas Atas, dan Bawah Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi Menggunakan Bus Umum Provinsi Jawa yang menaikkan harga batas atas dan batas bawah tarif kendaraan guna menyesuaikan harga BBM dan biaya *sparepart* / suku cadang kendaraan. Hal ini berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah. Diketahui dari hasil survei jika terjadi sedikit saja kenaikan tarif maka akan memberatkan penumpang dikarenakan pengeluaran semakin bertambah sehingga mempengaruhi pendapatan bersih masyarakat. Akibatnya banyak penumpang saat ini yang memilih beralih ke angkutan lain dengan harga murah yang mana akan berimbas kepada pendapatan operator bus karena para operator bus menggunakan sistem setoran dalam pembagian gaji, makin sedikit penumpang maka akan berpengaruh pada pembagian pendapatan mereka.

Melihat keadaan di lapangan saat ini maka perlu dilakukannya penelitian mengenai penentuan besaran tarif pada angkutan umum dengan menggunakan metode analisis berdasarkan Pedoman Teknis Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 yang didasarkan pada BOK dengan memperhatikan kemampuan dan kemauan membayar penumpang lalu membandingkannya dengan tarif yang ditentukan pemerintah serta tarif yang ditetapkan saat ini di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Diketahui dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka ditarik beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Berapa Biaya Operasional Kendaraan PO Bus Pelita Mas Surabaya – Malang ?
2. Berapa besar tarif PO Bus Pelita Mas berdasarkan BOK dengan analisis dari Pedoman Teknis Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002?
3. Apakah besar tarif di lapangan sesuai dengan analisis tarif berdasarkan BOK maupun berdasarkan ketentuan yang berlaku?
4. Apakah tarif di lapangan sudah sesuai dilihat berdasarkan pandangan penumpang baik dari *Ability To Pay* maupun *Willingness To Pay* ?

1.2 Tujuan

Dari beberapa masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian antara lain :

1. Mengetahui berapa besar BOK yang dikeluarkan oleh PO Pelita Mas rute Surabaya - Malang.
2. Mengetahui berapa besar tarif PO Pelita Mas berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan dengan analisis dari Pedoman Teknis Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002.
3. Mengetahui kesesuaian tarif di lapangan dengan tarif berdasar BOK PO Pelita Mas maupun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
4. Mengetahui apakah tarif yang berlaku di lapangan sudah sesuai berdasarkan pendapat atau *Ability To Pay* maupun *Willingness To Pay*.

1.3 Batasan Masalah

1. Analisa BOK berdasarkan Pedoman Teknis Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002.
2. Objek evaluasi hanya angkutan umum PO Pelita Mas rute Surabaya - Malang.
3. Lingkup penelitian hanya pada kota Surabaya dan Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk pihak pengelola :

Dapat memberi masukan kepada pengelola maupun pemerintah daerah mengenai penetapan tarif angkutan berdasarkan biaya operasional.

2. Manfaat bagi peneliti :

Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman

3. Manfaat bagi pembaca dan masyarakat umum :

Penelitian ini dilakukan agar para pembaca dan masyarakat dapat memahami dan mengetahui besar tarif yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan biaya operasional kendaraan.

